

Dukungan pemerintah daerah terhadap pelayanan darah di provinsi Jawa Barat tahun 2010-2015

Zumrudah, Eva Byuti

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=125178&lokasi=lokal>

Abstrak

Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Di Negara berkembang, transfusi darah paling banyak diberikan untuk perawatan komplikasi kehamilan dan persalinan, anemia yang parah pada anak-anak, trauma dan perawatan kelainan darah. Akses pada darah yang aman dapat mencegah hingga seperempat kematian ibu setiap tahun. Persediaan darah adalah 2% dari populasi penduduk. Persentase tertinggi kebutuhan ideal darah se-Indonesia ada di Jawa Barat namun ketersediaan darah hanya mencapai 35,4% kebutuhannya. Penelitian ini ingin mengetahui dukungan pemerintah daerah tingkat Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan darah tahun 2010-2015. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peraturan daerah provinsi tentang penyelenggaraan kesehatan, namun belum mengacu pada peraturan baru terkait pelayanan darah. Terdapat alokasi anggaran program rutin yang secara tidak langsung mendukung pelayanan darah dan bantuan hibah Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Barat. Bantuan hibah ini belum diperhitungkan dalam biaya pengganti pengolahan darah tingkat provinsi. Jumlah Unit Transfusi Darah dinilai mencukupi namun jumlah Bank Darah Rumah Sakit masih sedikit. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan Unit Transfusi Darah Pusat PMI masih sedikit. Tidak terdapat tenaga kesehatan PNS tingkat provinsi yang dibantu di UTD. Data Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat pendonor darah melalui desa siaga aktif belum dipetakan. Komunikasi data antara Dinas Kesehatan dan UTD masih lemah. Tren jumlah pendonor, jumlah produksi komponen darah dan tingkat partisipasi masyarakat semakin besar. Tren penggunaan darah meningkat di bidang kebidanan. Diperlukan sosialisasi peraturan-peraturan terbaru, penyesuaian peraturan daerah dengan kebijakannasional, penerapan jejaring pelayanan darah provinsi dan pelaksanaan program quick win pelayanan darah. Kata kunci: pelayanan darah, kebutuhan darah, dukungan pemerintah daerah, program quick win pelayanan darah.

Blood service is one of health services that utilize human blood as the base material for humanitarian and not for commercial purposes. In developing countries, most blood transfusions are given for pregnancy and childbirth complication treatment, severe anemia in children, trauma and blood disorders. Access to safe blood can prevent up to a quarter of maternal deaths annually. Blood supply recommendation is 2% of the population. The highest percentage of blood needs in Indonesia is in West Java which in 2013 availability of blood accounted for 35.4% needs. This study investigated the local government support of West Java province for blood service 2010-2015. This study was qualitative design with case study approach. The data collection obtained through in-depth interviews, observation, and study literature. The results showed there were provincial regulations on health administration, but not comply with the new regulations. There was a regular program budget allocation, which indirectly support the blood service and grants to Indonesia Red Cross branch West Java. This grant has not been taken into account in provincial level of blood processing charge. Blood transfusion services

were considered sufficient but the number of hospital blood banks were still small. Management information system among BTS-es integrated with Indonesia Red Cross Central BTS were small. There were no civil servants in provincial level employed at BTS. Blood donor data through Desa Siaga Aktif were not available. Data communication between the Provincial Health Office and BTS was still weak. There was a rising trend in the number of donors, blood component production and level of community participation. There was an increasing blood use trend in obstetrics. Socialization of recent regulations is needed, adjustment of local regulations with national policy, the implementation of the provincial network of blood services and the blood service quick-win program should be endorsed.

Key words : blood service, blood requirement, local government role, blood service quick win program